

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH PROPINSI  
LAMPUNG TERHADAP SANITASI TOTAL BERBASIS  
MASYARAKAT (STBM)  
(Studi di Kota Metro)**

**Skripsi**

**Gilang Rahman Adri Yunus  
1631040073**

**Program Studi : Pemikiran Politik Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH PROPINSI  
LAMPUNG TERHADAP SANITASI TOTAL BERBASIS  
MASYARAKAT (STBM)  
(Studi di Kota Metro)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



**Pembimbing I : Dr.H.Arsyad Sobby Kesmua.,L.c.,M.Ag  
Pembimbing II : Dr.Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TERHADAP SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) (Studi Di Kota Metro)**

**Oleh**

**GILANG RAHMAN ADRI YUNUS**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah keberhasilan program pada tahun 2019 ini tidak semua pilar tercapai secara maksimal hanya pilar 1 dan 2 saja yang berhasil itupun hanya disebagian kecamatan sehingga pilar 3,4,5 tidak maksimal maka dari itu adapun tujuan dari penelitian ini ingin melihat upaya pemerintahan Kota Metro ini dalam menjadikan berhasilnya Pilar 1 dan 2 dan faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya program STBM pada pilar 3 hingga ke 5 di Pemerintahan Kota Metro. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau bisa dikenal dengan STBM adalah sebuah program yang dibuat pemerintah untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan melibatkan serta memberdayakan masyarakat dengan metode berupa pemicuan. Di dalam program STBM ini terdapat 5 pilar STBM antara lain tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan kesatuan. Program STBM mempunyai Tujuan yaitu memfasilitasi masyarakat sehingga dapat mengenali permasalahan kesehatan lingkungannya sendiri , memfasilitasi masyarakat untuk menganalisis masalah kesehatan lingkungan mereka dengan metode pemicuan sehingga meninggalkan kebiasaan buruk mereka, serta memunculkan kemauan keras masyarakat untuk membuat tempat cuci tangan dirumah masing-masing dan menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis . Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan dilapangan yang kemudian dipelajari secara mendalam mengenai keadaan latar belakang dan interkasi lingkungan sosial baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari 13 petugas kesehatan lingkungan tiap puskesmas . Dan terdapat responden yang terdiri dari

10 orang masyarakat yang diambil dari tiap kecamatan masing masing berjumlah 2 . Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) faktor yang dikemukakan oleh George Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi dan fasilitas. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program STBM di Kota metro sudah baik karena komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat menggunakan komunikasi 2 arah, informasi mengalir dari pengirim ke penerima dan penerima memberi respon ke pengirim informasi, metode yang digunakan adalah door to door (pintu kepintu) dengan menggunakan kader STBM (natural leader) dan petugas kesling di setiap kecamatan serta melakukan pertemuan masyarakat dan aparat desa, Pemerintah juga memiliki sumber daya manusia yang mumpuni yakni petugas kesehatan ditempatkan di setiap kecamatan Kota Metro, sebagai bukti Pilar 1 sudah berjalan 100% tinggal menyelesaikan pilar 2 sampai ke 5. Tetapi proses pembentukan natural leader dan sumber daya anggaran terhambat., Oleh karena itu pemerintah harus mempercepat pembentukan natural leader dan mempercepat penganggaran karena natural leader sangat penting dalam pelaksanaan program STBM, jangan menghambat sumber daya anggaran, bahan dan material serta monitoring secara berkala ke masyarakat terkait pelaksanaan STBM sehingga pola perilakunya berubah.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Rahman Adri Yunus  
NPM : 1631040073  
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Studi di Kota Metro)”**. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu,alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung, Juli 2021  
Peneliti,



Gilang Rahman Adri Yunus





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukaramo Bandar Lampung, Tlp.(0721)703289

**PERSETUJUAN**

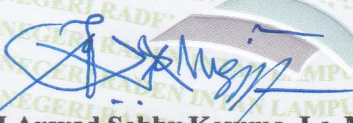
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TERHADAP SANITASI  
TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM), (STUDI  
DI KOTA METRO)**  
Nama : **GILANG RAHMAN ADRI YUNUS**  
NPM : **1631040073**  
Jurusan : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**  
Fakultas : **USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.A**  
**NIP. 195808231993031001**

  
**Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**  
**NIP. 197801302011012004**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

  
**Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**  
**NIP. 197801302011012004**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukaramo Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM), (STUDI DI KOTA METRO)”** Disusun oleh, **GILANG RAHMAN ADRI YUNUS, NPM : 1631040073**, Program Studi **Pemikiran Politik Islam**, Telah diujikan dalam Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa, 27 Juli 2021**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Agung M. Iqbal, M.Ag** (.....)

**Sekretaris : Eska Prawisudawati Ulpa, S.Psi, M.Si** (.....)

**Penguji Utama : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si** (.....)

**Penguji Pendamping I : Dr.H.Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.A** (.....)

**Penguji Pendamping II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** (.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

**Dr. H. M. A. Anshori, M. Ag**  
NPM 163104003131989031004

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat (QS. An-Nisa' : 58).





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kupinta dan kusematkan hanya kepada Engkau Allah SWT Rabb semesta alam yang Maha Esa, dan atas takdir dan segala nikmat-Mu kau jadikan hamba seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi langkah awal dalam meraih cita-citaku.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai cinta kasih sayang serta hormat untuk orang-orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama saya menuntut ilmu:

1. Terima kasih teruntuk kedua orang tuaku Ayahanda Adri Yanto Yunus dan Bunda Anita kedua sosok malaikat yang Tuhan kirimkan utukku. Sosok yang menjadi penyemangat ketika aku lelah, sosok yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus selama hidupku, sosok yang bersedia mendengar keluh kesahku, dan sosok yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terimakasih sudah banyak berkorban selama ini. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian.
2. Kedua adikku yang kusayangi, Ghozali Syafri Adri Yunus dan Hanifah Adinda Syafitri Adri Yunus tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian serta motivasi yang mendorong supaya ayuk segera menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Semoga kelak kita bisa menjadi putra dan putri yang dapat membanggakan kedua orang tua kita.
3. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Amirino (alm) dan keluarga besar M.Faried Yunus (alm) yang telah mendukung dan mendoakan demi kelancaran dalam menyelesaikan studiku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Peneliti skripsi bernama lengkap Gilang Rahman Adri Yunus yang dilahirkan di Metro, pada tanggal 16 Mei 1998. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Adri Yanto dan Bunda Anita.

Peneliti mengawali pendidikan pertama di SD Muhammadiyah 1 Metro Pusat, dan lulus pada tahun 2010. Lalu peneliti melanjutkan pendidikan di MTs Ma'arif 02 Kotagajah, dan lulus pada tahun 2013. Dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kotagajah lulus pada tahun 2016.

Syukur alhamdulillah peneliti dapat melanjutkan pendidikan tingkat tinggi dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam riwayat organisasi, LK 1 HMI Komisariat Ushuludin Cabang Bandar Lampung dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam. Peneliti juga pernah menjadi Panitia Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Studi di Kota Metro)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar (S1) Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari pihak lain berupa bimbingan, petunjuk, saran, informasi dan pengarahan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan berterima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. M. Afif Anshori selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Arsyad Sobby Kesmua., L.c., M. A selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Septiawadi Kari Mukmin, M.A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan Saran dan Motivasi.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama prodi Pemikiran Poltik Islam yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Seluruh Staff dan Kepegawaian Fakultas Ushuluddin dan Studi

Agama yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran skripsi ini.

8. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf yang turut memberikan literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
9. Ketua Bidang Kesehatan Lingkungan yaitu Sri Minanti, ST , Petugas Kesling di setiap Kecamatan Kota Metro serta beberapa masyarakat Kota Metro.
10. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, kedua Adikku dan Nenek tercinta, serta keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan semangat, dorongan serta motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
11. Terima kasih untuk Teman dan Sahabat terbaik M. Reza Darmawan, Nabil Abdurrahman, Fadhilah Faiqoh, Wina Apriliani Pusea, Iffah Dzakiyah, Achmad Sidiq Setiawan , Hengky Ardiansyah , Rizki Ilmawan, dan Abdul Rohim yang telah saling support dan yang telah memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain. Semangat untuk meraih gelar S. Sos.
12. Teman-teman KKN kelompok 143 Desa Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang telah banyak memberikan pengalaman berharga dan terkhusus terima kasih untuk 40 hari kebersamaan yang bermakna yang selalu Memberikan canda,tawa dan kesan selama ini.
13. Anyik dan Siti Tecinta, serta keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan semangat.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub- Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
H. Metodologi Penelitian .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kebijakan Publik .....	19
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	19
2. Jenis kebijakan Publik .....	21
3. Tahapan Kebijakan Publik.....	21
B. Implementasi Kebijakan Publik .....	23
1. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	23
2. Tahapan Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	24
3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Proses Implementasi .....	27
C. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.....	30

1. Pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat...	30
2. Tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.....	31
3. 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.....	32
4. Tangga Perubahan Perilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.....	33
D. Kerangka Pikir .....	34

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Pemerintahan Kota Metro .....	35
1. Sejarah Kota Metro.....	35
2. Bentuk Pemerintahan Kota Metro .....	41
3. Keadaan Umum Kota Metro.....	44
B. Komponen Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.....	49
1. Penciptaan lingkungan yang kondusif .....	49
2. Peningkatan dan kebutuhan dan permintaan Sanitasi.....	49
3. Peningkatan Penyediaan Sanitasi .....	50
C. Pelaksanaan Teknis Sanitasi Total Berbasis Masyarakat .....	51
1. Persiapan STBM tingkat Pusat .....	51
2. Persiapan STBM tingkat Provinsi .....	51
3. Persiapan STBM tingkat Kabupaten/Kota.....	51
4. Pelaksanaan STBM tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan .....	52
5. Pelaksanaan STBM tingkat Desa/Kelurahan .....	52
6. Pelaksanaan STBM tingkat Pusat/Provinsi .....	52

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Upaya Pemerintah Kota Metro dalam menjadikan Berhasilnya program STBM Stop Babs dan Ctps pada tahun 2019 .....	53
B. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya program STBM PS RT, PAMM RT, dan PLC RT pada tahun 2019 .....	74

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi.....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Hasil Pelaksanaan STBM di Metro Barat .....	4
Tabel 1.2 Laporan Hasil Pelaksanaan STBM di Metro Timur .....	4
Tabel 1.3 Laporan Hasil Pelaksanaan STBM di Metro Utara .....	4
Tabel 1.4 Laporan Hasil Pelaksanaan STBM di Metro Pusat .....	4
Tabel 1.5 Laporan Hasil Pelaksanaan STBM di Metro Selatan .....	5
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio .....	27
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	28
Tabel 2.3 Daftar Petugas Pelaksana STBM di Metro Utara .....	38
Tabel 2.4 Daftar Petugas Pelaksana STBM di Metro Barat .....	39
Tabel 2.5 Daftar Petugas Pelaksana STBM di Metro Pusat .....	39
Tabel 3.1 Daftar Petugas Pelaksana STBM di Metro Timur .....	40
Tabel 3.2 Daftar Petugas Pelaksana STBM di Metro Selatan .....	41





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tangga Perubahan Perilaku STBM .....	17
Gambar 1.2 Peta Kota Metro.....	25
Gambar 1.3 Persentase Luas Wilayah Kota Metro .....	26
Gambar 1.4 Wawancara dengan Petugas Kesling Metro Pusat.....	53
Gambar 1.5 Wawancara dengan Petugas Kesling Metro Barat.....	53
Gambar 2.1 Wawancara dengan Petugas Kesling Metro Selatan .	54
Gambar 2.2 Wawancara dengan Petugas Kesling Metro Timur ...	54
Gambar 2.3 Wawancara dengan Petugas Kesling Metro Utara ....	55
Gambar 2.4 Wawancara dengan Masyarakat Metro Pusat.....	56
Gambar 2.5 Wawancara dengan Masyarakat Metro Barat.....	57
Gambar 3.1 Wawancara dengan Masyarakat Metro Utara.....	57
Gambar 3.2 Wawancara dengan Masyarakat Metro Timur .....	58
Gambar 3.3 Wawancara dengan Masyarakat Metro Selatan.....	58



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam langkah utama yang harus diperhatikan untuk menghindari hal yang tidak sesuai dan ketidak salah pahaman akan judul, dalam hal ini perlu sesuatu yakni sebuah penegasan judul penelitian dalam skripsi ini, supaya selaras dengan ketentuan dan penafsiran yang akan menimbulkan pemahaman akan judul ini yaitu **“Implementasi Program Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Studi di Kota Metro)”**. Maka diperlukannya pembatasan dalam pengertian dari istilah judul tersebut, adapun pembatasan yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

Implementasi program Menurut Harnifah Harsono<sup>1</sup> implementasi memiliki arti melaksanakan suatu kebijakan menjadi sebuah tindakan kebijakan dari politik ke administrasi. Dalam artian pengembangan suatu kebijakan untuk menyempurnakan sebuah program dalam menyempurnakan sebuah program harus adanya penyesuaian proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk menciptakan birorkrasi yang efektif, Menurut Joan L.herman program adalah hal yang perlu di coba lakukan oleh seorang dengan mengharapkan apa yang dicoba tersebut akan mendapatkan hasil, program merupakan kegiatan yang direncanakan tentunya sebuah rencana akan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan dengan begitu keberhasilan sebuah program dapat diukur. Pencapaian sebuah program tersebut harus diukur dengan menggunakan alat tertentu<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Harnifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, 2002, h.67

<sup>2</sup> Suharsimi Arikonto, *Penilaian Program Pendidikan*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988 h.1,h.2

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, kemudian diturunkan ke daerah masing-masing dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/3052/III.03/2015 Tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Target Akses Universal Sanitasi 2019 di teruskan ke pemerintah Kota Metro membentuk sebuah program sebagai lanjutan dari Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2014 dan Surat edaran Gubernur Lampung Tentang Intruksi Walikota Metro No 5 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Metro dan dilanjutkan ke Puskesmas Se-Kecamatan Kota Metro.

Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) adalah sebuah program yang dibuat oleh kementerian kesehatan, tujuan dibentuknya program ini adalah untuk menciptakan pola hidup masyarakat untuk paham dan akan sadar dengan lingkungan dan menjauhkan masyarakat dengan budaya perilaku masyarakat yang masih kurang dan sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Menurut Azrul Anwar berpendapat bahwa sanitasi adalah cara dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat yang berpacu pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan harus mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Kota Metro dibentuk atas dasar Undang-undang No. 12 Tahun 1999, yang sebelumnya berstatus Kota Administratif. Pertama kali terbentuk Kota Metro hanya terdiri dari dua kecamatan saja, yakni Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul. Setelah otonomi daerah kota Metro mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga terjadi pemekaran kecamatan menjadi lima kecamatan, yakni Kecamatan Metro Barat, kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Utara, dan Metro Selatan. Kecamatan Metro Barat yang semula merupakan bagian dari Kecamatan Bantul dan sebagian wilayah Kecamatan Metro Raya, lalu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro No. 25 Tahun 2000, tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Metro Barat

menjadi kecamatan definitif. Wilayah Kecamatan Metro Barat meliputi empat kelurahan, yaitu Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Mulyosari, Kelurahan Ganjar Agung dan Kelurahan Ganjar Asri. Dan total kecamatan Kota metro memiliki 5 kecamatan dan 22 kelurahan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Penegasan judul diatas yang di maksudkan dalam penelitian ingin mempertegas bahwa penelitan ini guna mengetahui sejauh mana perkembangan program ini apakah sudah terelaisasi dengan baik atau belum berjalan dan peneliti tertarik karena program stbm ini adalah program turunan dari pemerintah provinsi hingga kedaerah- daerah lalu apakah pemerintah daerah ini mengimplementasikan program ini sesuai tidak dengan arahan pemerintah pusat dan juga penelitian ini dilakukan di kota metro , Maka dalam hal ini Penulis meneliti Implementasi Program Pemerintah Propinsi Lampung Terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Studi di Kota Metro.

## **B. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang ditulis, peneliti memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian :

### **1. Fokus Penelitian**

- a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Metro pada tahun 2019
- b. Sejauh mana program Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini berjalan di Kota Metro

### **2. Sub-Fokus Penelitian**

- a. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Metro dan Puskesmas Se-Kota Metro

---

<sup>3</sup> BPS (Badan Pusat Statistik Kota Metro) Tahun 2015 Yang Diupdate Tahun 2016.



### C. Latar Belakang Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019 menyatakan tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk menciptakan universal access sanitasi di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2019 . Universal access adalah terbentuknya 100% seluruh penduduk Indonesia terlayani akses sanitasi yang bisa dinyatakan sangat layak yang tentunya semua kebutuhannya di bawah naungan hukum dalam persiapan ketersediaan air minum dan sanitasi. Pada tingkatan skala Nasional naungan hukum tersebut termuat dalam Peraturan Presiden No.185 tahun 2014 tentang Percepatan akses penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dirjen PP dan PL pada tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu permasalahan sanitasi bukan hanya berfokus pada masalah pembangunan sarana dan prasarannya saja, tetapi permasalahan higienis masyarakatnya juga. Salah satu strategi untuk menciptakan dan meningkatkan akses sanitasi di kabupaten/kota bukan hanya dengan penyediaan sarana langsung secara fisik maupun secara non fisik tetapi harus berdasarkan pemberdayaan masyarakat. Tentunya pemberdayaan masyarakat ini sangat penting mengingat program ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jikalau tidak ada kebutuhan serta kemauan dari masyarakat itu sendiri.

Jika menelaah pada tujuan dari program STBM yang berusaha untuk mewujudkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan hidup, tentunya keberhasilan program ini STBM ini tidak luput dari peran pemerintah dibantu dengan masyarakat didalamnya. Maka point utama dari bentuk pembangunan dan masyarakat adalah terkait dengan adanya pemberdayaan masyarakat.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau bisa disingkat STBM, adalah sebuah pendekatan untuk mengubah pola hidup masyarakat menjadi higienis melalui sebuah program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan

program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang telah dijelaskan dalam RPJMN pada tahun 2014-2019 diwajibkan bagi seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia mulai dari tangga yang rendah yakni desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk menjalankan program ini. Hal ini dikarenakan permasalahan masyarakat akan hidup higienis dan sanitasi di Indonesia masih sangat banyak yang kurang hidup bersih dan bahkan di beberapa kota di Indonesia masih banyak pola hidup masyarakat yang masih dengan pola hidup kurang bersih atau bisa dikatakan kotor.

Walikota kota metro Dalam rangka pencapaian Universal Akses Sanitasi 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan *Sustainable Development Goals* (SDG's) ke-6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang maka diperlukan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum berkualitas dan sanitasi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/3052/III.03/2015 Tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Target Akses Universal Sanitasi 2019, dimana salah satu kegiatan pokok yang penting dilakukan adalah mengupayakan kelurahan yang terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan atau Stop Buang Air Besar Sembarangan/*Open Defecation Free* (ODF). Pencapaian Kelurahan *Open Defecation Free* dapat dilakukan secara terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, menindaklanjuti hal tersebut, dengan ini Walikota Metro Menginstruksikan:

1. Mewajibkan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program STBM di Kota Metro serta mengembangkan 5 pilar utama STBM.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan kepada Walikota Metro.<sup>4</sup>

### **5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
3. Pengelolaan Air Minum-Makanan Rumah Tangga (PAMM RT);
4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS RT);
5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC RT)

Berdasarkan Hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti, STBM di kota metro sudah terlaksana cukup baik dan masih dalam pencapaian pada pilar pertama dan sebagian pilar kedua, sedangkan pilar selanjutnya masih dioptimalkan dan diharapkan semua pilar tercapai 100%. Dan terkait dengan strategi STBM yakni merubah pola hidup masyarakat dari kurang bersih menjadi lebih sehat lagi dan selalu menjaga kebersihan karena kebersihan ada keterkaitannya dengan budaya masyarakat itu sendiri, budaya harus sesuai dengan norma, nilai-nilai dan keyakinan individu yang ada karena untuk menjaga keseimbangan sosial. Dengan begitu faktor sosial budaya dan perilaku masyarakat sangat berpengaruh

---

<sup>4</sup> [Stbm.kemendes.go.id/kota metro](http://Stbm.kemendes.go.id/kota metro)

terhadap program ini bahkan program kemasyarakatan, selain dari peran dari pemerintah terkhusus pemerintah kota metro.

Program STBM dikota metro telah memasuki babak akhir dalam RPJMN 2015-2019 tetapi pelaksanaan program masih berjalan dan baru terlaksana pada program pilar pertama dan ada sebagian pilar ke 2 yang sudah terlaksana , hal ini sangat memberikan apresiasi pemerintah provinsi guna menjadikan kota metro menjadi rujukan nasional akses sanitasi di Indonesia. Keberhasilan pada pilar pertama menjadikan kota metro sebagai kota ODF (Open Defecation Free) pertama sesumatera yang dinobatkan pencapaian 100% sanitasi pada pilar pertama hal ini tentunya menjadi pendongkrak dalam menjalankan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pilar yang lainnya walaupun dalam setiap pilar memiliki karakteristik yang berbeda-beda, setidaknya formula yang diterapkan pemerintah kota dalam pelaksanaan pilar pertama dapat dikembangkan ke pilar lainnya karena pemerintah kota metro memiliki target pelaksanaan semua pilar harus mencapai 100 % tentunya dengan cara yang baik dan berjalan dengan baik juga. Untuk mewujudkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menuju Universal Acces 2019 tentunya Pemerintah harus menyelesaikan program tersebut pada tahun 2019 berikut adalah hasil laporan hasil pelaksanaan kegiatan STBM di 5 kecamatan Se-Kota Metro:

**Tabel 1.1**

**Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di Kecamatan Metro Barat 2019**

No	Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Pencapaian Target (%)
1.	Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)	100% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Barat
2.	Mencuci tangan dengan	100% KK di empat kelurahan kecamatan



	sabun dan air mengalir	Metro Barat
3.	Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga	90% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Barat
4.	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	70% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Barat
5.	Pengelolaan Limbah cair rumah tangga	70% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Barat

Tabel 1.2

**Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di  
Kecamatan Metro Timur 2019**

No	Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Pencapaian Target (%)
1.	Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)	100% KK di lima kelurahan kecamatan Metro Timur
2.	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir	100% KK di lima kelurahan kecamatan Metro Timur
3.	Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga	90% KK di lima kelurahan kecamatan Metro Timur
4.	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	70% KK di lima kelurahan kecamatan Metro Timur
5.	Pengelolaan Limbah cair rumah tangga	70% KK di lima kelurahan kecamatan Metro Timur

**Tabel 1.3**  
**Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di Kecamatan**  
**Metro Utara 2019**

No	Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Pencapaian target (%)
1.	Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)	100% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Utara
2.	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir	86% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Utara
3.	Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga	94% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Utara
4.	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	81% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Utara
5.	Pengelolaan Limbah cair rumah tangga	79% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Utara

**Tabel 1.4**  
**Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di Kecamatan**  
**Metro Pusat 2019**

No	Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Pencapaian target (%)
1.	Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)	100% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Pusat
2.	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir	90% KK di empat kelurahan kecamatan

		Metro Pusat
3.	Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga	90% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Pusat
4.	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	70% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Pusat
5.	Pengelolaan Limbah cair rumah tangga	70% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Pusat

Tabel 1.5

**Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan STBM di Kecamatan  
Metro Selatan 2019**

No	Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Pencapaian target (%)
1.	Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)	100% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Selatan
2.	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir	90% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Selatan
3.	Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga	80% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Selatan
4.	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	70% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Selatan
5.	Pengelolaan Limbah cair rumah tangga	70% KK di empat kelurahan kecamatan Metro Selatan

Berdasarkan hasil Pra penelitian pelaksanaan STBM dari ke 5 kecamatan tersebut menunjukan pilar 1 sudah mencapai 100% , dikecamatan metro barat dan timur pilar ke 2 sudah mencapai 100% tetapi dikecamatan yang lain pilar 2 sampai 5 masih belum berjalan optimal. Berdasarkan penjelasan dan uraian masalah tersebut, Peneliti tertarik ingin menyoroti terkait pelaksanaan semua pilar STBM pada level pemerintah di kota metro. Untuk lebih sistematis jelas dan lebih terarah perlu adanya pengelompokkan dan pembatasan masalah yang tegas. Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Program Pemerintah Propinsi Lampung terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), studi di kota metro.

#### **D. Rumusan Masalah**

Didasari atas latar belakang masalah tersebut penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Metro dalam menjadikan berhasilnya pelaksanaan pilar program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stop Buang Air Besar (STOP BABS) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada tahun 2019?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya pilar program Sanitasi Total Berbasis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah tangga (PAMM-RT) dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT) pada tahun 2019?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Metro dalam menjadikan berhasilnya pilar program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STOP BABS dan CTPS.

- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Metro PAMM-RT , PLC-RT dan PS-RT.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna serta menjadi referensi bagi pembaca dalam bidang politik sejauh mana pemerintah dan menjadikan masyarakat melakukan perubahan perilaku menjadi higienis lagi lalu diharapkan masyarakat dapat berjalan beriringan dalam menyukseskan program STBM serta mengerti bagaimana pelaksanaan program ini berjalan dengan baik sesuai keinginan keduanya.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Penulis; untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan kedepanya dapat menjadi contoh menjadikan pemimpin yang memiliki integritas.
- b. Bagi Pemerintah Kota metro; Adanya penelitian ini semoga berguna bagi seluruh elemen instansi pemerintah untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun beberapa penelitian terdahulu dan guna untuk menghindari plagiarism peneliti telah temukan beberapa temua yang terkait dengan Implementasi Program Pemerintah Kota Metro Terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul ***“Analisis Peran Pemerintah Pekon dalam Pelaksanaan Pilar pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Pringsewu (Studi di Pekon Wonodadi dan Pekon Kediri Kecamatan Gading Rejo)”***. Karya Robby Ahmadi, Universitas Lampung 2019”. Pada karya ilmiah tersebut terfokus pada Analisis peran pemerintah di kabupaten pringsewu dalam pelaksanaan pilar pertama STBM di Pekon Wonodadi dan Pekon Kediri apakah sudah terlaksana dengan baik dan terlealisasi pilar pertamanya serta sesuai tidak dengan arahan kepala pekon, sedangkan penelitian skripsi saya terfokus pada apakah semua program ini sudah terlaksana dengan baik bukan hanya pilar pertama tetapi pilar kedua hingga ke lima karena sesuai arahan pemerintah kota metro untuk menjadikan kota metro bukan hanya sebagai kota deklarasi rujukan pilar pertama tetapi juga harus dengan pilar lainnya .
2. Skripsi yang berjudul ***“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Pertama (STOP BABS) di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2015”*** karya Nurul Siti Fatimah Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang 2015. Pada karya ilmiah tersebut terfokus pada mengkaji bagaimana Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan STBM pada pilar pertama berbeda dengan skripsi saya yang menitik fokuskan bukan hanya pada pilar pertama tetapi semua pilar serta harus ada partisipasi masyarakat tetapi pemerintah harus ikut terjun kedalam masyarakat guna terlaksananya STBM secara penuh dan total sesuai arahan pemerintah pusat.

Fokus penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang digunakan diatas, penelitian diatas tersebut digunakan



untuk sebagai panduan peneliti melakukan penelitian terhadap Implementasi program pemerintah Propinsi Lampung terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM studi di Kota Metro. Tujuan dari penelitian ini adalah guna untuk mengetahui sejauh mana mana pelaksanaan STBM dikota metro dan apakah sudah mencapai target yang diharapkan pada tahun 2019 yakni 100% semua pilar berhasil dilaksanakan atau masih ada yang masih kurang dan jikalau masih ada yang kurang faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya semua pilar STBM ini dikota metro.

## H. Metodologi Penelitian

Metode adalah sebuah cara yang sesuai dengan prosedur yang berguna untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis.<sup>5</sup> untuk mencapainya sebuah langkah penelitian harus sesuai dengan metode yang ada untuk berfungsi supaya penelitian dapat berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk memperoleh data yang diperlukan guna menunjang penelitian, maka peneliti nantinya akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang meneliti fenomena sosial ataupun permasalahan manusia. Pada pendekatan ini membuat suatu gambaran yang kompleks, peneliti meneliti kata-kata, meneliti laporan dari pandangan responden kemudian dilakukan studi sehingga dapat menggambarkan secara akurat sifat dari fenomena sosial tersebut<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi aksara, 2001, H.42

<sup>6</sup> Marwadani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 4.

## 2. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang kemudian dipelajari secara mendalam mengenai keadaan latar belakang dan interkasi lingkungan sosial baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan pada hakikatnya ialah metode yang digunakan untuk mendapatkan realitas atau fakta yang berlangsung di lingkungan masyarakat atau kelompok lembaga. Dalam proses penelitian ini mengangkat data, informasi terkait Implementasi Program Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Studi di Kota Metro)

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menyajikan dan memberi gambaran dalam bentuk narasi atau rangkaian cerita atau kalimat yang merupakan referentasi hasil wawancara, observasi dan studi dokumen<sup>7</sup>. Pada penelitian deskriptif hasil penelitian bersifat fakta disajikan sesuai kenyataan yang nampak sebagaimana adanya<sup>8</sup>. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Program Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Studi di Kota Metro) secara sistematis.

---

<sup>7</sup> Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), 375.

<sup>8</sup> Qomariyatus Sholihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Malang: Ub Press, 2020), 55.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu:

#### a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data utama yang dicari sendiri oleh peneliti<sup>10</sup>. Data primer diperoleh langsung dari responden atau subjek penelitian dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan untuk dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan dibutuhkan untuk tujuan pengambilan keputusan. Dalam penelitian dikenal dengan adanya sampel. Sampel dibutuhkan apabila peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya disebabkan adanya keterbatasan sebab apa yang dipelajari dari sampel kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang didasari pada pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan peneliti. Pertimbangan ini maksudnya ialah orang yang dianggap paham tentang hal-hal yang peneliti harapkan. Data primer hasil wawancara diperoleh dari orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat seperti Kabid Kesehatan Masyarakat (Sri Mintati, S T), Petugas kesling di 5 kecamatan Kota Metro Desy Eva Rohmawati, SKM dan Vivi Pancaryani, SKM (Metro Barat), , Sri Sulasmi, Amd, KI, Ety Lestari, Amd, KI, dan Lela Fitriani, Amd, KI (Metro Utara), Niken Andewi, Amd. KI dan Rani Mariana, Amd. KI (Metro Selatan), Siswati, S.ST, Yuni Utami Susilastuti, dan Novi Yuliana Eka S (Metro Timur), Mardiana, Amd.KI dan Nurvita, Amd.KI (Metro Pusat),

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h.129

<sup>10</sup> Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, 702.

serta Perwakilan masyarakat di setiap Kecamatan Kota Metro.

#### b. Sumber data Sekunder

Data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Bisa dalam berbentuk data yang tersusun yang berbentuk dokumen-dokumen.<sup>11</sup> Dalam hal ini Data sekunder merupakan data yang sudah jadi, atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.<sup>12</sup> Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, berbagai karya dokumentasi yang terkait objek penelitian dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Observasi

Metode observasi dalam penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian pada sesuatu objek dengan melibatkan indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi ialah pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau bila perlu dengan pengecap<sup>13</sup>. Observasi tidak hanya mengukur perilaku responden melainkan dapat digunakan juga untuk merekam fenomena yang terjadi.

#### b. Metode Wawancara

Suatu dialog berbentuk tanya jawab yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden dinamakan wawancara. Dialog tanya jawab tersebut dilakukan sistematis berdasarkan tujuan penelitian dengan

---

<sup>11</sup> Ibid,94.

<sup>12</sup>Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yp Fak. Psikologi UGM, 1985), h. 89.

<sup>13</sup> Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media, 2015), 81.

instrumennya yakni pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin artinya meskipun dilaksanakan secara bebas tetapi pembicaraan dilakukan secara terpisah sehingga arahnya jelas walaupun fleksibel. Pada wawancara bebas terpimpin ini pewawancara diberi kesempatan menggali data dengan mengembangkan modifikasi tertentu dari pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan<sup>14</sup>.

### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulannya dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen ataupun arsip maka peneliti menggunakan dokumen berbentuk tulisan dan gambar. Dokumen tulisan berupa catatan, sejarah, biografi, peraturan, kebijakan adapun dokumen gambar dapat berupa foto, gambar hidup dan lainnya. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari data primer.

---

<sup>14</sup> Budiharto, *Metode Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran Egc, 2008), 90.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye, adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do).<sup>15</sup> Sedangkan menurut Charles O.Jones, Istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Pemahaman yang diperjelas oleh Richard rose yakni bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan tersendiri.”<sup>16</sup>

Beberapa definisi diatas merupakan berbagai macam bentuk dari pemikiran-pemikiran para pakar politik, akan tetapi definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil dalam kebijakan karena mereka memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Sebagai contohnya pelaku kebijakan yakni kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih dan para analisis kebijakan.

---

<sup>15</sup> AG. Subarsono, *Analisis kebijakan Publik “konsep, Teori, dan Aplikasi*, 5<sup>th</sup> (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.2

<sup>16</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media presindo, 2007). H 16-17



Sebagai rentetan kebijakan publik sangatlah banyak, maka dapat dikelompokkan secara sederhana menjadi tiga.<sup>17</sup>

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau kebijakan ini dapat berupa bentuk peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam definisi Thomas Dye, mengandung makna bahwa: pertama, Kebijakan publik tersebut dibuat badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui adanya jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah salah mengambil kebijakan. dengan kata lain semua hal yang pemerintah ketahui termasuk infrastruktur jalan, akan tetapi pemerintah tidak mencanangkan perbaikan jalan pada jalan disuatu wilayah tertentu maka pemerintah sudah membuat kebijakan. Dan sebaliknya jika pemerintah mengetahui dan membuat kebijakan, mengenai infrastuktur. Jalan dan merencanakan perbaikan serta membuat kebijakan untuk diperbaiki, dengan demikian pemerintah pun sudah membuat kebijakan.

---

<sup>17</sup> William, N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Pres, 2003), H 111

## 2. Jenis kebijakan publik

Dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>18</sup>

### a. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: pertama. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Ketiga, Peraturan Pemerintah, Keempat, Peraturan Presiden, Kelima, Peraturan daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

### b. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, keputusan bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.

### c. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang diatasnya, Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## 3. Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi

---

<sup>18</sup>Dunn William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi ke III), (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009), h. 72.

kebijakan, tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>19</sup>

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam Proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakam tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

---

<sup>19</sup>Budi, Winarno, Kebijakan Publik Teori dan proses, (Yogyakarta: Media Presindo 2007).h 32-34

#### e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

### B. Implementasi Kebijakan Publik

#### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi memiliki arti sebuah pelaksanaan kebijakan menjadi sebuah tindakan dari kebijakan public ke administari serta tersusun secara matang dan terperinci yang memiliki tujuan untuk mentertibkan, mensejahterakan dan menanggulangi sebuah rencana yang mengalami permasalahan. Implementasi memiliki pengertian lain yakni sebuah bentuk pelaksanaan kebijakan yang diterapkan ke dalam aktivitas masyarakat serta dalam suatu kebijakan akan menghasilkan sesuatu yang ingin diharapkan.

Menurut Ripley dan Franklin implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan.<sup>20</sup> Grindle memberikan pandangannya tentang

---

<sup>20</sup>Ripley, Randal B. And Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy Secon Edition, the Dorsey Press*, (Chicago-Illionis, 1986), h. 148.

tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai hasil dari pemerintah.

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky yang dikutip berdasarkan oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti implementasi mempunyai makna dengan beberapa yang menjadi kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan sebuah misi yang diwujudkan dalam sebuah kebijakan (*to complete*).<sup>21</sup>

Sedangkan Hord aswell dan Abraham Kaplan beranggapan bahwa kebijakan publik hendaknya mengandung nilai-nilai seperti tujuan dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Edi Suharto mengungkapkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang berisi tentang prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara untuk bertindak yang dibuat secara terencana, sistematis, dan konsisten dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ealau dan Prewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku serta dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).<sup>22</sup>

## 2. Tahapan proses Implementasi Kebijakan Publik

### 1. Tahap interpretasi (Interpretation)

Tahap interpretasi adalah tahap yang menjabarkan sebuah kebijakan yang Bersifat abstrak

---

<sup>21</sup> Erwan Bagus Purwanto dan Dyah Ratih Sulirtyastuti, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia, (Yogyakarta : Gava Media, 2012), hal. 20

<sup>22</sup> Edi Suharto, Analisis kebijakan Publik, edisi revisi. Bandung. Alfa Beta, 2005 hal. 7

ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Tetapi juga harus diikuti dengan kegiatan komunikasi kebijakan yakni sosialisasi agar seluruh masyarakat (stakeholders) dapat mengetahui dan paham apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Tentunya kebijakan ini masih perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan supaya semua yang terlibat dalam kebijakan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak hanya paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.

## 2. Tahap Pengorganisasian (to organize)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang akan menjadi pelaksana sebuah bentuk kebijakan (penentuan siapa yang menjadi lembaga dan pelakunya). Penetapan anggaran (berapa besar anggaran yang

diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakannya serta mempertanggungjawabkannya). Penetapan sarana dan prasarana (apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan.

### a. Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan harus bergantung kepada jenis kebijakan apa yang dilaksanakan. Namun setidaknya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dinas, badan, kantor, Unit pelaksanaan teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah
2. Sektor swasta



### 3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

#### 4. Masyarakat yang terlibat

Menetapkan pelaku kebijakan tidak hanya sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan tetapi juga harus menetapkan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

#### b. Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures)

Setiap melaksanakan sebuah kebijakan tentunya harus ada sebuah standard operating procedures (SOP) sebagai bentuk pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan supaya mereka tahu apa yang perlu dipersiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang harus dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### c. Sumber Dana Keuangan dan Peralatan

Sumber dan keuangan dan peralatan harus perlu ditetapkan berapa besar anggaran yang perlukan dan dari mana sumber anggaran tadi, dan peralatan apa yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Biasanya anggaran untuk melakukan kebijakan tentunya sangat bergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang dilaksanakan. Demikian pula macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung pada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Tanpa peralatan yang cukup memadai tentunya efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan akan berkurang.

#### d. Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini perlu ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam

melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pada kepemimpinan yang digunakan. Apakah menggunakan pola kolegal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai coordinator. Bila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan untuk menjadi coordinator biasanya lembaga yang terkait secara erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai leading sector bertindak sebagai coordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi baik tentunya harus ada penetapan pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebuah pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standard untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

f. Tahap Aplikasi (Application)

Merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang disebutkan sebelumnya.<sup>23</sup>

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Di dalam sebuah studi kebijakan publik terdapat banyak sekali model implementasi, diantara model implementasi kebijakan publik Van Meter, Edward III, Grindle, dan Mazmanian dan Sabatier.

---

<sup>23</sup> Jokowi, Analisis kebijakan publik hal, 90-94

## 1. Model Implementasi Edward III

Model Edward menyatakan ada 4 faktor atau variable yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah proses implementasi sebuah kebijakan. 4 variable atau factor tadi antara lain meliputi variable atau factor communication, sumber daya resources, fasilitas dan disposisi.

### a. Faktor Komunikasi (communication)

Komunikasi dijelaskan sebagai bentuk proses penyampaian informasi komunikasi kepada komunikan. Komunikasi kebijakan dapat diartikan menjadi proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan supaya pelaku kebijakan dapat mengetahui, dan memahami apa yang perlu menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan supaya para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan secara matang apa saja yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

### b. Sumber Daya (Resource)

Faktor Sumber Daya memiliki peran yang penting dalam implementasi kebijakan, Sumber daya mencakup artian yang luas yakni mencakup ke dalam sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

c. Sumber Daya Manusia

Edward III menegaskan bahwa sumber daya manusia harus cukup dari jumlah dan cakap dalam keahliannya, dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan sebuah tugas, anjuran, serta perintah dari atasan (pimpinan), Sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah petugas yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki harus sesuai dengan tugas pekerjaan yang ingin ditangani menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

e. Disposisi

Disposisi ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti kejujuran, komitmen dan demokratis. Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan namun juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya,

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.<sup>24</sup>

#### **4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**

##### **a. Pengertian STBM**

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan, strategi dan program untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemiciuan. Perilaku hygiene dan sanitasi yang dimaksud antara lain tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan besar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Perilaku tersebut merupakan rangkaian kegiatan sanitasi total. Selanjutnya rangkaian perilaku tersebut disebut sebagai pilar STBM, kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan kegiatan namun perlu diprioritaskan pilar mana yang paling mendesak prioritas berdasarkan kriteria: 1) luasnya akibat (dampak) yang ditimbulkan oleh perilaku itu, 2) kemampuan masyarakat untuk menanggulangi, 3) keterdesakan untuk ditanggulangi, 4) keterdesakan , akibat yang akan timbul apabila persoalan tidak segera ditanggulangi.

STBM dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat sadar, mau dan mampu untuk melaksanakan sanitasi total yang diambil dari dirinya sendiri. Bukan melalui paksaan. Melalui cara itu diharapkan perubahan perilaku tidak terjadi pada saat pelaksanaan program melainkan berlangsung seterusnya.

Metode yang digunakan dalam STBM adalah metode pemiciuan. Metode pemiciua ini dilaksanakan oleh tim fasilitator dengan cara memicu masyarakat

---

<sup>24</sup>*Ibid.* h. 74.

dalam lingkup komunitas terlebih dahulu untuk memperbaiki sarana sanitasi sehingga tercapai tujuan dalam hal ini memperkuat budaya perilaku hidup bersih dan masyarakat serta mencegah penyakit berbasis lingkungan. Factor-faktor yang harus dipicu antara lain rasa jijik, rasa malu, takut sakit, aspek agama, privacy, dan kemiskinan. Setelah pemicuan factor tersebut terlaksana, dibentuklah komite dan komunitas tersebut. Komite dibentuk agar apa rencana aksi dari masyarakat yang terpicu dapat berjalan dengan baik. Selain itu monitoring dari tim fasilitator juga harus ditetapkan.

#### **b. Tujuan dari program STBM**

1. Memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengenali permasalahan kesehatan lingkungannya sendiri
2. Memfasilitasi masyarakat untuk mengalisis masalah kesehatan lingkungan mereka dengan memicu perasaan jijik, malu, takut sakit, dan lain sebagainya sehingga muncul kesadaran untuk merubah perilakunya kearah perilaku hidup bersih dan sehat dengan meninggalkan kebiasaan buruk yang tidak ramah lingkungan.
3. Memunculkan kemauan keras masyarakat untuk membangun tempat cuci tangan di rumah masing-masing dan menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis.

Dalam program ini masyarakat dilibatkan dalam suatu aktivitas. Keadaan ini dapat memberi stimulus, sehingga terjadi partisipasi. Partisipasi selanjutnya menimbulkan interaksi antar anggota masyarakat sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan pada dirinya sehingga timbul kesadaran tentang keadaan dirinya tersebut atau terjadi realisasi. Kesadaran atau realisasi inilah yang kemudian menimbulkan keinginan ataupun dorongan untuk berubah, yakni



mengubah keadaanya yang jelek menjadi baik. Keadaan inilah yang menunjukkan motif pada diri seorang telah terbentuk. atas dasar motif inilah yang akan terjadi perubahan perilaku.

Prinsip dari program nasional STBM antara lain non-subsidi, kebersamaan, keberpihakan terhadap kelompok miskin, keberpihakan pada lingkungan, prinsip tanggap kebutuhan, kesetaraan jender, pembangunan berbasis masyarakat, dan berkelanjutan.

### c. Pilar STBM

STBM adalah sebuah pendekatan untuk memperbaiki kesehatan lingkungan masyarakat, mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.

STBM mempunyai 5 indikator kesehatan lingkungan (pilar):

#### a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)

Stop buang air besar sembarangan adalah kondisi setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan dan menggunakan jamban ramah lingkungan (tidak dibuang dipermukaan tanah atau badan air).

#### b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun pada waktu yang tepat.

#### c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah tangga (PAMM-RT)

Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (PAMM-RT) adalah suatu proses pengelolaan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan

keperluan oral lainnya. Tujuan dari pilar ketiga adalah untuk mengurangi kejadian penyakit yang ditularkan melalui air minum dan makanan.

d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)

Pengelolaan sampah rumah tangga adalah proses pengelolaan sampah dengan aman pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Pengelolaan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan pendaur ulangan atau pembuangan dan material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan.

e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)

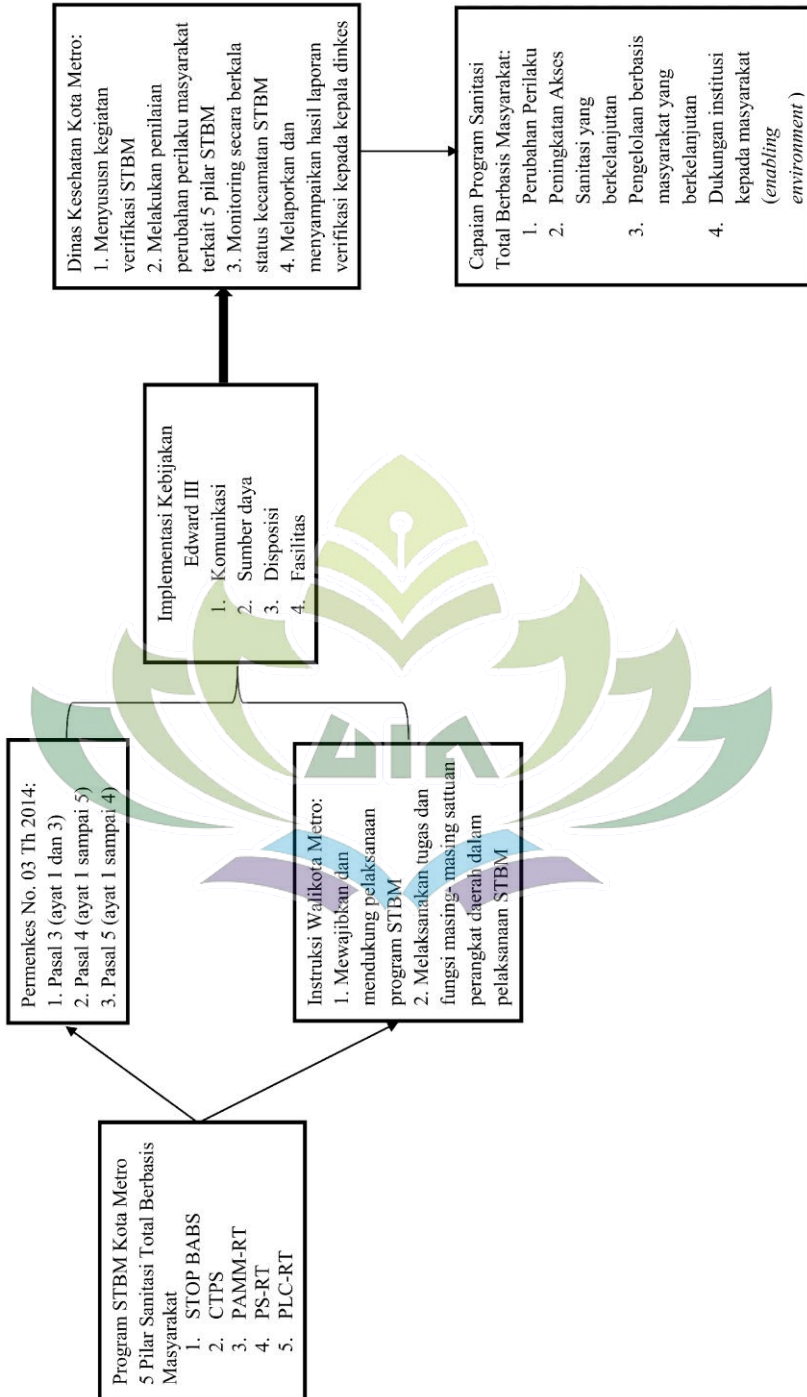
Pengelolaan limbah cair rumah tangga adalah proses pengelolaan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan.

d. Tanga Perubahan Perilaku STBM

GAMBAR 1.1



### E. Kerangka Pikir



## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku

- AG. Subarsono.2013. *Analisis kebijakan Publik “konsep, Teori, dan Aplikasi,5<sup>th</sup>* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn N, William. 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Erwan Bagus Purwanto dan Dyah Ratih Sulirtyastuti.2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesi*, Yogyakarta : Gava Media
- Edi Suharto.2005. *Analisis kebijakan Publik*, edisi revisi. Bandung. Alfa Beta
- Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumar.2013. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Guntur Setiawan.2004.*Implementasi dalam birokrasi pembangunan*, Bandung:Remaja Rosdakarya Offset
- Harnifah Harsono.2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta :Rineka Cipta,
- Prof.Dr.Sugiyono.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*,Bandung: Alfabeta
- Usman Husain, Purnomo.2001.Stiady,Amar,*Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:Bumi aksara
- Sumadi Suryabata.1987. *Metode penelitian*, Jakarta : rajawali
- Lexy J. Moelong.1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
- Ripley Grace A Franklin and Rendal B. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, Second Edition the Dorsey Press*, Chicago: Illions.
- Winarno Budi. 2012. *Kebijakan Public (Teori dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: Buku Seru.

### **Sumber Jurnal**

Abdul Qohar, “Revitalisasi Manajemen Pemerintahan Modern”.  
Jurnal Tapis Vol. 8 Juli-Desember 2012

Ali Abdul Wakhid, “Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia ”.  
Jurnal Tapis Vol. 1 Januari-juni 2017

### **Sumber Skripsi**

Analisis Peran Pemerintah Pekon dalam Pelaksanaan Pilar pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Pringsewu (Studi di Pekon Wonodadi dan Pekon Kediri Kecamatan Gading Rejo)”. Karya Robby Ahmadi, Universitas Lampung 2019.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Pertama (STOP BABS) di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2015.

### **Sumber Peraturan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000

Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 132 Tahun 2013

Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/3052/III.03/2015